

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021



KECAMATAN PADANG GANTING
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya SKPD
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan/Struktur Kepegawaian Kantor Camat Padang Ganting
Tabel 2.2	Hasil Capaian Kinerja Masa Lalu Tingkat Capaian Misi Menyelenggarakan Tugas-tugas Pemerintahan Umum
Tabel 2.3	Hasil Capaian Kinerja Masa Lalu Tingkat Capaian Kinerja Misi Memberdayakan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Tabel 2.4	Hasil Capaian Kinerja Masa Lalu Tingkat Capaian Kinerja Misi Memberikan Pelayanan Umum kepada Masyarakat
Tabel 2.5	Hasil Capaian Kinerja Masa Lalu Tingkat Capaian Kinerja Misi Memberikan Pembinaan Agama, Sosial dan Budaya kepada Masyarakat
Tabel 2.6	Hasil Capaian Kinerja Masa Lalu Tingkat Capaian Kinerja Misi Penyusunan Secara Terpola, Administrasi dan Ketatausahaan Rumah Tangga
Tabel 2.7	Hasil Capaian Kinerja Masa Lalu Tingkat Capaian Kinerja Misi Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kabupaten Tanah Datar
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Padang Ganting
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Padang Ganting sesuai RPJMD 2016-2021
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Ganting
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Ganting
Tabel 5.1.i	Tujuan 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Tabel 5.1.ii	Tujuan 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Tabel 5.1.iii	Tujuan 3 : Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Pendekatan yang Prima dan Efektif
Tabel 5.1.iv	Tujuan 4 : Meningkatnya Pembinaan Agama dan Sosial Budaya
Tabel 5.1.v	Tujuan 5 : Meningkatnya Tertib Administrasi
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kantor Camat Padang Ganting yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 ASN Kecamatan Padang Ganting

Diagram 2 Daftar Kendaraan Dinas Kecamatan Padang Ganting

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Daftar Aset Peralatan dan Mesin Kecamatan Padang Ganting

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan Kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat dirampungkan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016 – 2021.

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016 – 2021 memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Progran Kerja Pemerintahan Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016 – 2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2021 serta memuat informasi dan dampak yang timbul dalam mewujudkan visi, misi dan program kerja.

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016 – 2021 ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Pemerintahan Kecamatan Padang Ganting lima tahun ke depan sebagai bentuk implementasi dari RPJM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2021, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada di Kecamatan Padang Ganting.

Kami yakin dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016 -2021 ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum dapat mengakomodir aspirasi semua pihak, tentunya untuk ke depan diupayakan penyempurnaannya demi kemajuan Kecamatan Padang Ganting di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting 2016 – 2021, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga, semoga kontribusi dan pemikiran yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Diketahui oleh;
BUPATI TANAH DATAR,

Padang Ganting,
CAMAT PADANG GANTING,

-- IRDINANSYAH TARMIZI --

-- AGUSRIL --
NIP.19680803 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus sebagai pemenuhan tuntutan reformasi perlu dilaksanakan dengan ketulusan sikap dan tindakan yang nyata. Tuntutan terhadap perlunya pelaksanaan Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuat prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui pelimpahan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, dimaksudkan untuk lebih memberdayakan daerah dalam mengembangkan potensinya sekaligus dapat mengurus sendiri rumah tangganya yang bertujuan untuk menjawab perkembangan keadaan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global.

Pergeseran pola dan strategi pembangunan daerah kepada pemberdayaan pemerintah daerah, diharapkan dapat menciptakan keadaan yang kondusif serta pertumbuhan masyarakat yang mampu membangun dirinya sendiri, kompetitif dalam pemenuhan minat, kebutuhan dan kepentingan bersama.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan arus reformasi maka terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintahan Kecamatan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta menjadikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai pewujud cita-cita bangsa dan Negara dengan prinsip-prinsip *Good Governance* antara lain:

1. Partisipasi, yaitu memberdayakan setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penegakan hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.
4. Kesetaraan, yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan, kepedulian para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
6. Wawasan kedepan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
8. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
9. Efisiensi, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
10. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan akhlak penyelenggara pemerintahan, agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat dengan biaya terjangkau.

Sebagai langkah tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem AKIP mencakup siklus yang terintegrasi, diawali dengan disusunnya Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja serta Evaluasi kinerja.

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Kinerja merupakan fase awal dalam system AKIP. Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja juga menyusun rencana Strategik. Rencana Strategik yang disusun oleh Satuan Kerja harus mempedomani Rencana Strategik Pemerintah Daerah yang pada dasarnya merupakan suatu keselarasan Rencana Strategik dalam lingkungan Pemerintah Daerah itu sendiri.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, transparan dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat efektif dan efisien serta bebas dari Korupsi dan Kolusi serta Nepotisme. Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, termasuk Kecamatan Padang Ganting harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya *Good Governance* tersebut dengan mengembangkan dan menerapkan suatu system AKIP.

Sistem AKIP merupakan siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang diawali dengan disusunnya **Rencana Strategis (Renstra)** atau **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** untuk masa lima tahun **dan Rencana Kerja (Renja)** untuk setiap tahun. Tahapan-tahapan berikutnya mencakup pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja, pelaporan capaian kinerja dalam bentuk **LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**, dan evaluasi kinerja dengan memamfa'atkan LAKIP bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa penyusunan Rancana Strategis merupakan tahap awal sistem AKIP yang paling penting. Rencana Strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

- a) Undang-undang No.12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No.25);
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010);
- f) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem AKIP mencakup siklus yang terintegrasi, diawali dengan disusunnya Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Kemudian dilanjutkan dengan Rencana Kinerja Tahunan, Pelaksanaan program dan kegiatan, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja serta Evaluasi kinerja.

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Kinerja merupakan fase awal dalam system AKIP. Untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja harus menyusun Rencana Strategik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Statejik (Renstra) mengkomunikasikan tentang Rencana Kerja Pemerintahan Satuan Perangkat Daerah untuk lima tahun.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

Sistematika penulisan Renstra Kantor Camat Padang Ganting tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan juga sistematika penulisan penyusunan Renstra Kantor Camat Padang Ganting Tahun 2016-2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT PADANG GANTING

Memuat bagaimana pelayanan yang diselenggarakan di Kantor Camat Padang Ganting

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT PADANG GANTING

Memuat isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Padang Ganting dalam pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terkhususnya pembangunan di Kecamatan Padang Ganting.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kantor Camat Padang Ganting untuk pembangunan kedepannya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk melaksanakan pembangunan Kantor Camat Padang Ganting kedepan diperlukan strategi dan kebijakan agar kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Padang Ganting dalam melaksanakan roda pemerintahan di kecamatan serta indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan atau pencapaian yang telah dilakukan dalam pemerintahan dan pembangunan di kecamatan juga menggambarkan kelompok sasaran sekaligus mengenai pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja Kantor Camat Padang Ganting yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagai bahan evaluasi serta tolak ukur pencapaian pembangunan di Kecamatan Padang Ganting.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dari Renstra Kantor Camat Padang Ganting Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016, dalam pasal 4 dinyatakan bahwa Tugas dan Wewenang Camat adalah :

“ Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah “

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan diwilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait diwilayah kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2016 ayat (3), camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

B. Fungsi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor

138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
 1. Melakukan koordinasi instansional di wilayah kerjanya.
 2. Melakukan koordinasi nagari di wilayah kerjanya
 3. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
 1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan, asistensi dan supervisi yang intensif dan praktis serta kontinyu kepada masyarakat dalam pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa.
 2. Menanamkan, meresapkan dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 3. Menghilangkan praktek-praktek diskriminasi antar suku, ras dan aliran maupun golongan dan pengelompokan berdasarkan falsafah hidup tertentu yang mengarah kepada eksklusivitas yang sekaligus berfungsi untuk menghilangkan hambatan demi terciptanya proses asimilasi, sikronisasi dan proses akulturasi budaya yang bernuansakan wawasan nusantara.
 4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dalam suasana sosiokultural yang religius dan pemantapan bagi pelaksanaan nilai-nilai budaya local serta ibadah bagi pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
 5. Mengupayakan terciptanya pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 6. Menjaga agar selalu tercipta ketahanan nasional
 7. Pembinaan suku terasing
- c. Penyelenggara pelayanan masyarakat
 1. Penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan
 2. Penyelenggaraan pemberian keterangan yang dilimpahkan
 3. Penyelenggaraan pembangunan/kegiatan yang dilimpahkan
 4. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan

- d. Pelaksana pemberdayaan masyarakat
1. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 2. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 3. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
- e. Penyelenggara tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.

Pemerintahan Umum

- 1) Melakukan pengawasan atas perizinan di wilayah kerjanya
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perjudian
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.

Kependudukan

- 1) Melakukan inventarisasi data kependudukan, catatan sipil dan perkembangannya.
- 2) Membantu dalam penyelenggaraan adm pelayanan umum bidang pencatatan penduduk antara lain akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian serta akta pengakuan dan pengesahan anak
- 3) Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, transmigrasi, TKI/TKW.
- 4) Memfasilitasi penanganan pengungsi.

Keagrariaan

- 1) Melakukan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
- 2) .Pengumpulan dan pengolahan administrasi pertanahan
- 3) Melakukan pendokumentasian adm pertanahan.
- 4) Menjadi saksi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan jual beli tanah
- 5) Menjadi anggota Panitia Pemeriksa Tanah.

- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan nagari

- 1) Melakukan pembinaan aparatur pemerintahan nagari dan BPRN
- 2) Melakukan pembinaan kerjasama antar nagari yang ada di wilayahnya

- 3) Melakukan pembinaan dan asistensi terhadap pelaksanaan pinjaman keuangan pemerintah nagari.
- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan hak asal-usul dan dinamika masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
- 5) Melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari.
- 6) Memfasilitasi proses pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari.
- 7) Pemberian pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan konsultasi bagi aparat dan masyarakat.

g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

- 1) Membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan koordinasi kewilayahan antar instansi dan aparat terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam forum Muspika.
- 2) Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Perda Kabupaten dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kerjanya.
- 3) Membuat analisis wilayah dan melakukan kajian terhadap kebijakan trantibum dan m,enyampaikannya sebagai rekomendasi kebijakan Kepala Daerah serta membuat laporan triwulanan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 4) Melakukan pembinaan operasional Satpol PP di wilayah kerjanya.
- 5) Menjaga pelayanan yang sama dan tidak ada tindakan-tindakan diskrimatif atau pelakuan tidak adil terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparaturn pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 6) Menjaga dan memelihara tentang administrasi dan register-register kecamatan
- 7) Menjaga dan memelihara ketaatan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
- 8) Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan dalam rangka meredam konflik dan agitasi sosial.
- 9) Penertban terhadap gangguan sosial
- 10) Perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.

11) Memfasilitasi penataan dan penertiban pedagang Kaki Lima

h. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi di bidang perencanaan.
- 2) Koordinasi di bidang pengendalian dan pengawasan.
- 3) Koordinasi pengelolaan dan penanganan kasus.

i. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.

- 1) Meningkatkan usaha perekonomian rakyat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya.
- 2) Menjaga dan mempertinggi taraf kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.
- 3) Menyelenggarakan atau mendukung kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan bencana alam atau bencana lainnya.
- 5) Mengoptimalkan kegiatan PKK, kepemudaan, kepramukaan, karang taruna dan organisasi sosial lainnya agar mengarah kepada sasaran yang positif.
- 6) Mengoptimalkan kegiatan pendidikan di nagari.
- 7) Berupaya mengatasi hal-hal yang luar biasa (*force majeure*) dan melaporkan kepada Bupati.
- 8) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.
- 9) Menyelenggarakan tugas-tugas insidental lainnya yang ditugaskan oleh Bupati

j. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

- 1) Penyusunan rencana tahunan kecamatan
- 2) Memfasilitasi rencana tahunan nagari
- 3) Penyusunan rencana anggaran satuan kerja kecamatan
- 4) Penyusunan laporan kinerja tahunan kecamatan
- 5) Pembinaan administrasi dan sistem pelaporan nagari
- 6) Pembinaan tertib administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, maka fungsi camat secara umum adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan diwilayah Kecamatan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat didukung oleh unsur staf sesuai Perbup Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2010, yang terdiri dari:

- **Sekretaris Kecamatan;** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketatausahaan, tata laksana, protocol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat, dan membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Perencanaan, dengan tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk/keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, penyusunan program dan protocol.
 - Sub Bagian Keuangan dengan tugas menyelenggarakan pelayanan adm keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- **Kasi Tata Pemerintahan;** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah nagari.
- **Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari;** mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari, menyiapkan bahan, melaksanakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

petunjuk atasan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

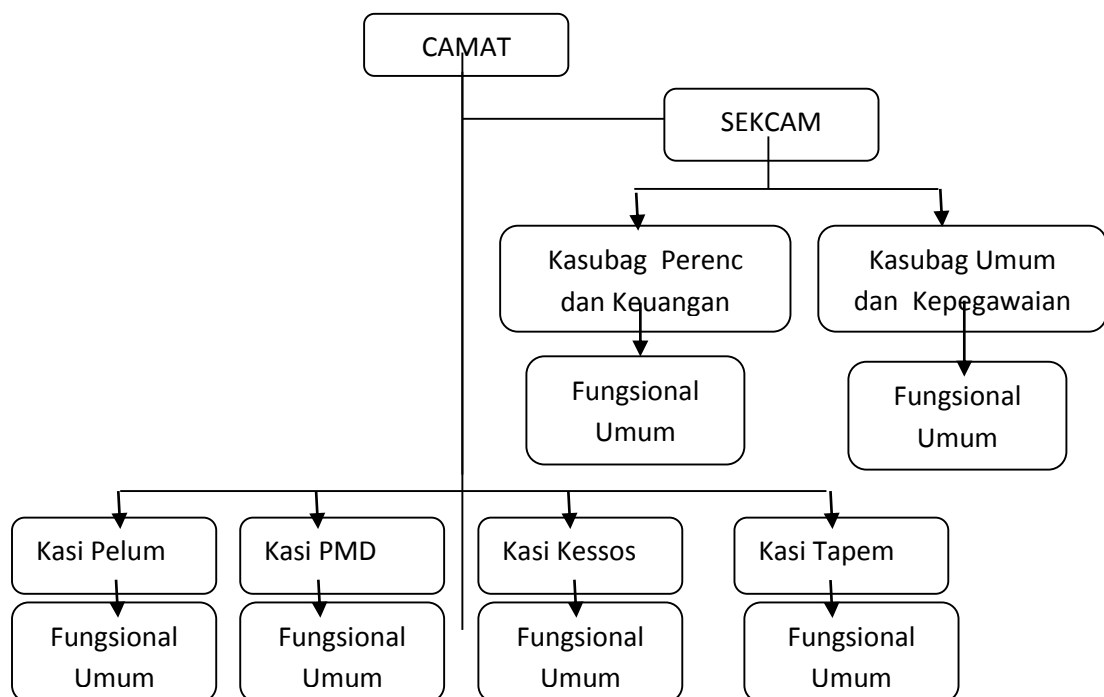
- **Kasi Ketentraman dan Ketertiban;** mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data bidang ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan sesuai dengan hasil survey di lapangan dan petunjuk yang berlaku serta menyajikannya dalam bentuk laporan, daftar, grafik dan klasifikasi serta mengadmkannya untuk bahan konsep bagi pihak yang membutuhkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan terjadi perubahan sesuai aturan Perangkat Daerah terbaru pada tahun 2016.
- **Seksi Kesejahteraan Sosial :** Mengumpulkan dan mengolah data dibidang Kesejahteraan Sosial memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Kelompok organisasi keagamaan seperti BKMT, Yasinan dan organisasi kepemudaan serta memonitor terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi masyarakat dan kepemudaan diwilayah Kecamatan Padang Ganting.
- **Seksi Pelayanan Umum :** Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut dengan surat-surat keterangan, rekomendasi, izin-izin dan melaksanakan perekaman , pencetakan e-KTP. Sesuai dengan petunjuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.
Khusus untuk Kecamatan Padang Ganting, Camat dibantu unsur staf yang terdiri dari:
 - Sekretaris Kecamatan
 - Kasi Tata Pemerintahan
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari
 - Kasi Kesejahteraan Sosial
 - Kasi Pelayanan Umum

- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- Dan staf lainnya.

C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka struktur Organisasi Kantor Camat Padang Ganting adalah sebagai berikut (Terlampir)

Struktur Organisasi Kecamatan Padang Ganting Sesuai Peraturan Bupati Tanah Datar No.46 tahun 2016 sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD

Kecamatan Padang Ganting Memiliki Pegawai sebanyak 12 Orang dan 3 Orang tenaga harian lepas.

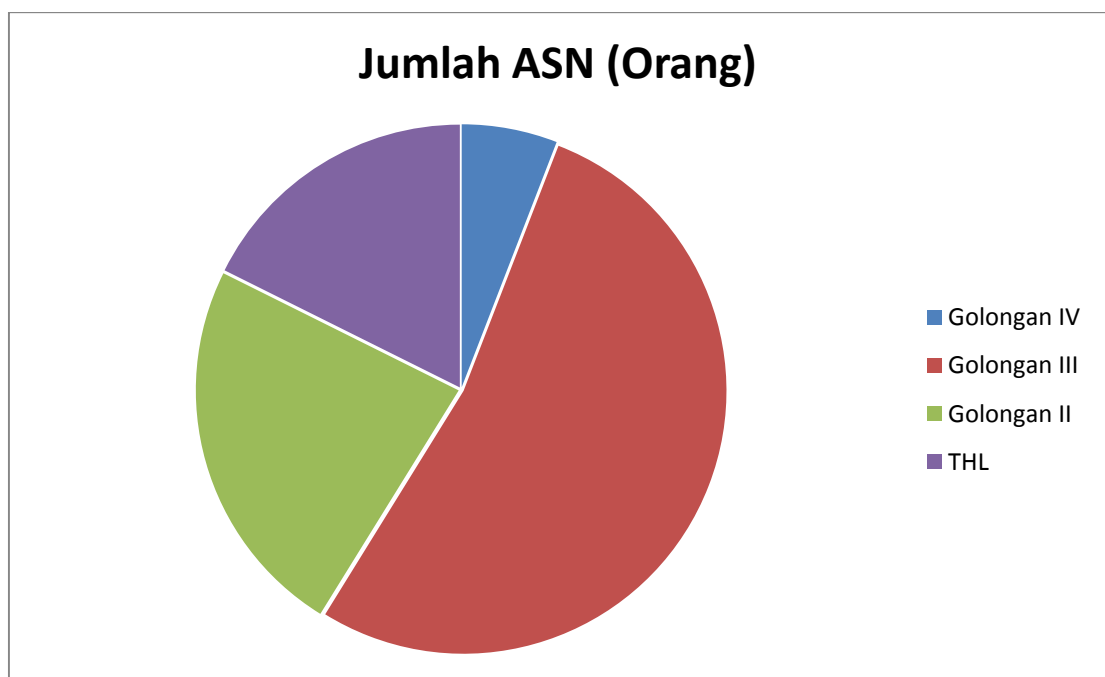
Susunan/Struktur Kepegawaian Kantor Camat Padang Ganting

Tabel 2.1

No	Jabatan	Esselon	Pangkat	Pendidikan
1	2	3	4	5
1.	Camat	III a	Pembina TK I	S1
2.	Sekretaris Camat	III b	Pembina	S1
3.	Kasi Tata Pemerintahan	Iva		

4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Iva	Penata Tk.I	S1
5.	Kasi Ksos	Iva	Penata Tk.I	S 1
6.	Kasubag. Umum & Perencanaan	IVb	Penata Tk.I	S 1
7.	Kasubag Keuangan	IVb	Penata Muda	S 1
8.	Bendahara Pengeluaran	-	Penata Muda	S1
9.	Bendahara Gaji	-	Penata Muda	D 3
10.	Staf Umum	-	Penata, Pengatur TK I	S1, SLTA
11.	Staf Kasi PMN	-	Pengatur Muda Tk. I	SLTA
12.	Pesuruh	-	-	S1
13.	Tenaga Harian Lepas	-	-	SMA, S1

Diagram 1. ASN Kecamatan Padang Ganting



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja

pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

a. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

1. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
3. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e. Efisiensi Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan

mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- 1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajiban.
- 2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- 3). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

HASIL CAPAIAN KINERJA KONDISI MASA LALU

Optimalisasi Jenis Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas

Kecamatan (masa 2010-2015)

Tabel 2.2

TINGKAT CAPAIAN, MISI : MENYELENGGARAKAN

TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN UMUM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra 2011- 2015	TINGKAT CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	1. Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral	1. Jumlah Rapat yang dilaksanakan 2. Jumlah Masalah yang dapat		24 X	24 X	24 X	24 X	24 X
					20 bh	22 bh	24 bh	24 bh	25 bh

		2. Terlaksananya Pengawasan Pemerintahan	diselesaikan 1. Berkurangnya Jumlah pelanggaran yang terjadi 2. Berkurangnya kasus dalam penyelenggaraan Pemerintahan		2 bh	2 bh	2 bh	2 bh	3 bh
		3. Terwujudnya rasa aman	1. Berkurangnya jumlah kasus yang timbul 2. Terciptanya rasa aman		-	-	-	1 bh	-
					4 Ks	4 Ks	3 Ks	3 Ks	4 Ks
					80 %	80 %	82 %	85 %	85 %

Tabel 2.3

**TINGKAT CAPAIAN KINERJA, MISI : MEMBERDAYAKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TINGKAT CAPAIAN				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat	1. Terlaksananya pembinaan kepada Pemerintahan Nagari	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai Perda	75 %	75 %	80 %	90 %	90 %
			2. Jumlah pembinaan yg dilakukan	6 X	6 X	6 X	6 X	6 X
		2. Terlaksananya pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan Nagari	1. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berfungsi	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
			2. Jumlah pembinaan yang dilakukan	4 X	4 X	4 X	4 X	4 X

Tabel 2.4

**TINGKAT CAPAIAN KINERJA, MISI : MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
KEPADA MASYARAKAT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TINGKAT CAPAIAN				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat	1. Terlaksananya pelayanan umum kepada masyarakat	1. jumlah KTP yang diterbitkan	2200	2160	2276	2410	2385
			2. Kepuasan masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
			1. Jumlah IMB yang dikeluarkan	5	5	5	4	3
			2. Kepuasan masyarakat	70 %	70 %	70 %	75 %	75 %
			1. Jumlah dispensasi surat nikah yang dikeluarkan	3	4	4	5	26
			2. Kepuasan masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
			1 jumlah HO yang dikeluarkan	4	4	3	3	4
			2. Kepuasan masyarakat	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
			1. Jumlah SIUP yg dikeluarkan	4	5	5	8	8
			2. Kepuasan masyarakat	80 %	80 %	75 %	75 %	80 %
			1. jumlah SKKB yg direkomendasi	106	98	127	19	112
			2. Kepuasan masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
			1. jumlah Surat pindah yg direkomendasi	118	111	129	125	136
			2. Kepuasan masyarakat	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
			1. jumlah akta yg dikeluarkan	5	6	7	7	8
			2. Kepuasan masyarakat	70 %	80 %	82 %	85 %	88 %

Tabel 2.5

**TINGKAT CAPAIAN KINERJA, MISI : MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
KEPADA MASYARAKAT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TINGKAT CAPAIAN				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Meningkatkan pembinaan agama social dan budaya	1. Terlaksananya peningkatan pembinaan keagamaan	1. jumlah pembinaan keagamaan	10 X	12 X	12 X	12 X	12 X
			2. berkurangnya kasus pelanggaran agama	10 X	9 X	7 X	5 X	3 X
			3. terbentuknya kelompok pengajian	4	4	4	5	3
		2. terlaksananya peningkatan pembinaan lembaga Kesenian, olah raga dan Budaya	1. Jumlah pembinaan lembaga kesenian olah raga Dan budaya yang dilaksanakan	4 X	4 X	4 X	4 X	4 X
			2.jumlah kegiatan kesenian Olah raga dan budaya Yang dilaksanakan	12 X	10 X	8 X	12 X	12 X
			3.jumlah prestasi olah raga Kesenian dan budaya	4 bh	4 bh	4 bh	6 bh	5 bh
		3.Terlaksananya pembinaan keluarga miskin	1.Jumlah KK Miskin yang dibina	634 kk	682 kk	985 kk	486 kk	431 kk
			2. Berkurangnya KK Miskin	-	-	-	-	-
			3. Daya beli masyarakat meningkat	2	3	3	3	3

Tabel 2.6

**TINGKAT CAPAIAN KINERJA, MISI : PENYUSUNAN SECARA TERPOLA,
ADMINISTRASI DAN KETATAUSAHAAN RUMAH TANGGA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TINGKAT CAPAIAN				
				2011	2012	2013	2014	2015
5	Meningkatkan tertib administrasi	1. Terlaksananya tertib : - administrasi perkantoran	1. Pengelolaan sesuai ketentuan dan tepat sasaran	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
			2. terpenuhinya kewajiban pelaporan keningkat Kabupaten	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		- administrasi Keuangan - administrasi Kepegawaian - administrasi pengawasan - administrasi pembangunan						

Tabel 2.7

**TINGKAT CAPAIAN KINERJA, MISI : MENGOPTIMALKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TINGKAT CAPAIAN				
				2011	2012	2013	2014	2015
6	Meningkatkan partisipasi Masyarakat	Terlaksananya peningkatan peran serta Masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1 Musrenbang sesuai ketentuan dan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
			2. Jumlah kehadiran komponen Masyarakat dalam musrenbang	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

		2. terlaksananya peningkatan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Jumlah pelaksanaan goro	6 x	6 x	8 x	8 x	10 x
			2. Jumlah tenaga Goro	500	600	650	850	1100 org
			3. Jumlah swadaya dinilai dengan uang	500	480	425	600	615
			4. Jumlah usulan dari Masyarakat	42 bh	39 bh	48 bh	60 bh	38 bh
		3. terlaksananya peningkatan pengawasan Masyarakat terhadap pembangunan	1. berkurangnya keluhan Masyarakat terhadap pembangunan Nagari (secara tertulis)	2	2	1	-	-
			2. Berkurangnya Jumlah penyimpangan yang terjadi	-	-	-	-	-
		4. terlaksananya peran serta Masyarakat dalam dunia usaha	1. Jumlah pembinaan yg dilakukan kepada kelompok UEM-SP	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x
			2. Jumlah UEM-SP yang terbentuk	3 klp	3klp	5 klp	4 klp	4 klp

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Padang Ganting
Kabupaten Tanah Datar**

[illegible]

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Padang Ganting terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

b. Peluang

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Padang Ganting terdapat beberapa peluang, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan.
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Padang Ganting dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor

TABEL 2.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PADANG GANTING

KABUPATEN TANAH DATAR

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggara n	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242,066,625	186,437,000	200,130,700	220,143,770	242,158,147	229,415,619	-				95					18,304	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183,898,375	84,957,000	95,102,700	104,612,970	115,074,267	160,650,693					87					(13,764,822)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,000,000	12,500,000	19,800,000	21,780,000	23,958,000	4,932,500					99					3,791,600	
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	18,000,000	19,800,000	21,780,000	23,958,000	9,932,000					99					2,791,600	
URUSAN KESEHATAN																-	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	5,000,000	13,380,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	4,997,400					100					2,200,000	
URUSAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																-	
Program Peningkatan Keamanan dan	10,000,000	9,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	10,000,000					100					1,000,000	

Kenyamanan Lingkungan																		
Program Ppemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	-	-	-											-	
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	60,000,000	55,461,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	59,333,500					99						6,000,000	
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																	-	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	14,856,000	5,000,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000						-						(1,771,200)	
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	-	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	55,000,000	60,710,000	80,000,000	80,000,000	85,000,000	54,328,200											6,000,000	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	19,000,000	19,000,000	33,000,000	34,000,000	34,000,000	18,909,400					100						3,000,000	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa(Penanggulangan	25,000,000	15,458,000	15,458,000	25,000,000	20,000,000	13,908,700					56						(1,000,000)	

Kemiskinan)																	
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																-	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	45,000,000	49,520,000	165,150,000	175,000,000	175,000,000	44,908,000						100				26,000,000	
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga	15,000,000	10,000,000	60,000,000	60,000,000	65,000,000	14,931,200						100				10,000,000	
URUSAN STATISTIK																-	
Program Pengembangan data/Informasi/Sta tistik Daerah	10,000,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	-						-				400,000	
URUSAN KEBUDAYAAN																-	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	16,000,000	19,970,000	30,000,000	30,000,000	35,000,000	9,231,100						58				3,800,000	
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAH																-	
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	-	15,000,000	25,000,000	50,000,000	20,000,000	-						-				-	
URUSAN KEUANGAN																-	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14,000,000	13,500,000	14,000,000	15,000,000	15,000,000	13,975,000						100				200,000	

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	10,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	16,000,000	9,987,500					100					1,200,000	
--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----------	--

2.5 Sarana Prasarana Kecamatan Padang Ganting

Kecamatan Padang Ganting memiliki 1 bangunan gedung kantor, 1 rumah dinas, 1 unit kendaraan roda 4, 5 unit kendaraan roda 2 dan aset-aset lainnya yang dimiliki Kecamatan Padang Ganting dalam menunjang pelayanan publik.

Grafik 1. Daftar Aset Peralatan dan Mesin Kecamatan Padang Ganting

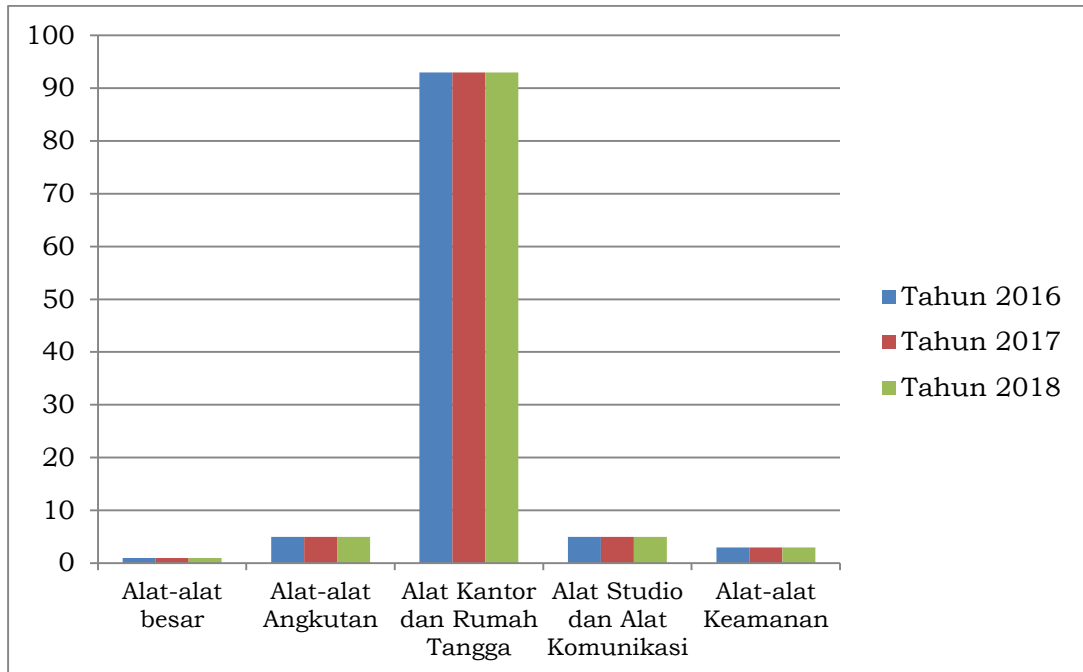
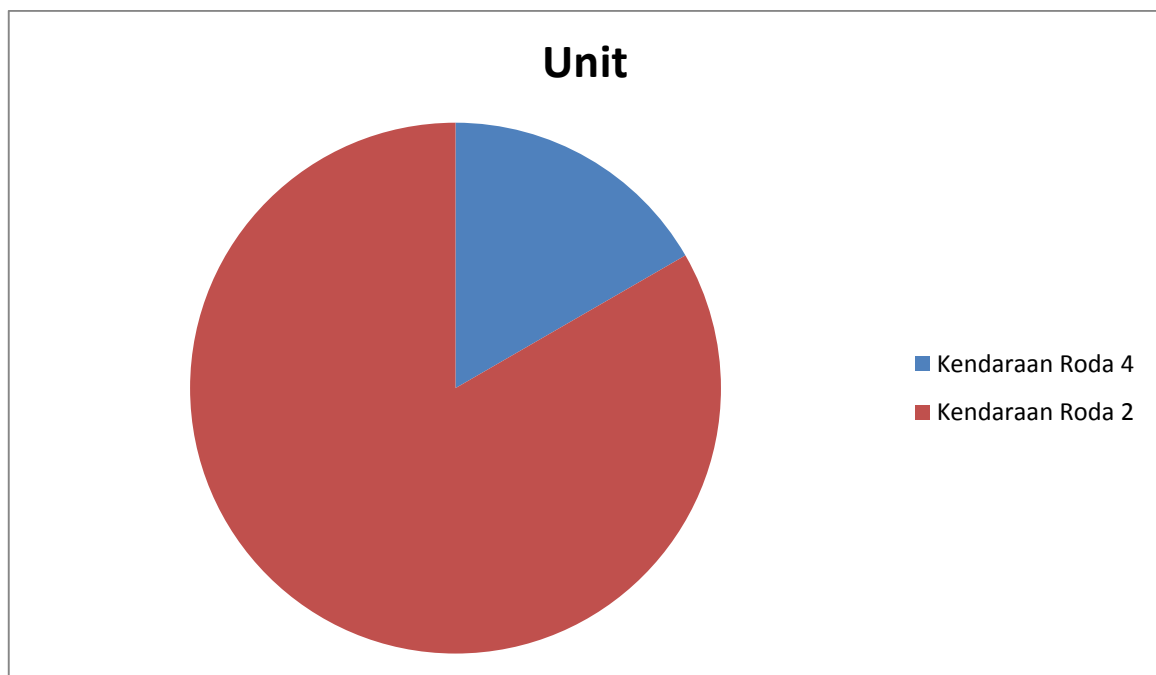


Diagram 2. Daftar Kendaraan Dinas Kecamatan Padang Ganting



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan yang merupakan salah satu SKPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan seperti peralatan computer dan mebeuler untuk pelayanan umum (PATEN),
2. Permasalahan yang perlu diantisipasi adalah bidang pelayanan/ perizinan kepada masyarakat yang kewenangannya masih belum mjelas keberadaanyan (yang mana yang diserahkan dan mana yang belum) berada di SKPD namun tetap dikoordinasikan oleh Kecamatan.

TABEL 3.1 dibawah ini merupkan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada pelayanan Kecamatan Padang Ganting beserta faktor yang mempengaruhinya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya pelayanan di Kecamatan	Belum maksimalnya percetakan / penerbitan KTP Elektronik dan Perizinan Paten	Belum Adanya Alat, Jaringan sering rusak dan Blangko sering kosong, SDM terbatas, kewenangan tidak jelas, kurang sadarnya masyarakat terkait administrasi kependudukan
		Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas ASN di Kecamatan	Tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki ASN
3	Sumber-sumber pendapatan daerah	Rendahnya tingkatan Pelunasan PBB	Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Datar dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

1. **Kabupaten Madani** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. **Kabupaten Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
3. **Kabupaten Sejahtera** adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.
4. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Misi Pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infra struktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan .
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Sebagai salah satu SKPD yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat Padang Ganting yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan Padang Ganting telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan Padang Ganting baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas Pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan Padang Ganting.

Tabel faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat Padang Ganting Terhadap Pencapaian Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat digambarkan sebagai berikut : .

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai ABS sBK				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan, adat dan budaya			
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	tentang kegiatan Guru tahfizh Kecamatan	Belum terbentuknya rumah tahfizh di setiap jorong	Adanya anggaran bagi guru tahfizh sebagai motivasi dalam melaksanakan kegiatan
2	Misi 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS SBK			
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kurangnya Anggaran untuk pembinaan lingkungan	Dukungan Anggaran belum memadai	Juara Lomba Kabupaten Sehat TK Provinsi dan TK Nasional

3	Misi 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS SBK			
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan Musrembang Nagari dan Kecamatan	Pola dan Sikap masyarakat yang kurang tentang Perencanaan Nagari	Tingginya perhatian orang rantau terhadap kampung halaman dalam membangun Nagari ke depan
4	Misi 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS SBK			
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Bantuan untuk Lembaga / Organisasi kemasyarakatan	Kurangnya Anggaran untuk Lembaga Kemasyarakatan	Partisipasi dan swadaya dari lembaga masyarakat sangat tinggi dalam melaksanakan kegiatan
5	Misi 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS SBK			

	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang kurang aktif di Kecamatan	Rendahnya kemauan pemuda dalam berorganisasi	Diberikan Sosialisasi dan pelatihan kepada Pemuda
6	Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS SBK			
	Program Penanggulangan Kemiskinan	Distribusi Raskin	Kurangnya Mutu Beras yang didistribusikan kepada masyarakat	Berkurangnya Masalah Kemiskinan
7	Misi 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
	Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan	Kurangnya pembinaan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	Dukungan Anggaran belum memadai	Pembinaan dan bantuan poskamling dari kesbangpol Kabupaten
8	Misi 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persiapan Pemilihan Wali Nagari Serentak	Masih rendahnya partisipasi masyarakat	Tingginya Minat Tokoh Masyarakat dalam

			dalam pilwana	bursa pencalonan Wali Nagari
9	Misi 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Pemungutan PBB tidak sesuai target	Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB	Diberikan sosialisasi kepada Masyarakat
10	Misi 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
	Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Pelaksanaan Evaluasi APB Nagari	Belum semua Aparatur Nagari dan Kecamatan yang mengerti tentang Penyusunan APB Nagari	Dilakukan Monev secara berkala serta pendampingan kepada Nagari
11	Misi 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Diklat Formal	Kurangnya Aparatur di Kecamatan yang mendapatkan diklat	Anggaran Diklat di perbesar

12	Misi 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat (PATEN)	Proses Pelayanan Perizinan belum maksimal	Koordinasi denga Perangkat Daerah Terkait belum Maksimal dan Staf Camat Kurang	Dukungan dari KPPT dan adanya penambahan Tenaga Harian Lepas

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan visi Kecamatan Padang Ganting adalah ” **EFEKTIF DALAM BERKOORDINASI, PRIMA DALAM PELAYANAN**” yang didukung Misi Kecamatan Padang Ganting secara khusus adalah:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum diwilayah Kecamatan.
2. Memberdayakan Pemerintahan nagari dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang Prima dan Effektif.
4. Menyelenggarakan secara maksimal pembinaan Keagamaan dan SOSBUD.
5. Penyusunan secara terpola Administrasi dan ketatausahaan rumah tangga.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dengan visi misi tersebut maka isu strategis yang dapat dikembangkan di Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut :

1. Menambah sarana dan fasilitas dan sarana kerja termasuk pemeliharaan kantor kecamatan Padang Ganting, karena kantor yang sudah tidak layak lagi untuk mendukung Pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif
2. Pembinaan kepada masing-masing Aparat Nagari sehingga yang bersangkutan mampu memahami manajemen pembangunan.
3. Meningkatkan dan menggali sumber- sumber dana untuk mendukung anggaran operasional kegiatan.
4. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur.
5. Meningkatkan sistim dan menambah sarana informasi .
6. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat untuk meyakinkan kelompok – kelompok masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi serta punya semangat kemandirian dalam pembangunan.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber – sumber pendapatan daerah untuk menunjang keberhasilan program pembangunan, antara lain : Melihat dari Potensi wilayah bahwa Kecamatan Padang Ganting adalah daerah dengan potensi Pariwisata yang cukup besar di Kabupaten Tanah Datar dengan memiliki objek wisata yang sangat potensial seperti Talago di Nagari Atar dan

Pemandian Air Panas. Selain itu Kecamatan Padang Ganting juga sebagai penghasil Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta hasil hutan rakyat yang layak untuk terus dibina dan dikembangkan menjadi sebuah potensi daerah yang **TERINTEGRASI**, komoditas sebagaimana dimaksud antara lain :

- i. Komoditas Pertanian :
 - Padi
 - Jagung Manis
 - ii. Komoditas Perkebunan :
 - Jeruk Nipis
 - Karet
 - Kelapa
 - Kakao
 - iii. Komoditas Peternakan :
 - Peternakan Sapi
 - Peternakan Kambing.
8. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian serta peningkatan pembangunan.
 9. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran aktif anggota LINMAS Nagari dalam upaya penangkalan secara dini gangguan keamanan, termasuk kriminal dan teroris.
 10. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Nagari utamanya antara Nagari yang maju dengan Nagari tertinggal sehingga satu sama lain ada kerjasama yang saling menguntungkan.
 11. Mengadakan pembinaan pada organisasi politik, sehingga para tokoh dan simpatisan dapat memiliki kesadaran berpolitik yang dilandasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.
 12. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda sehingga yang bersangkutan dapat mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap lingkungannya.
 13. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

TABEL 3.3 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR CAMAT PADANG GANTING SESUAI RPJMD 2016 s/d 2021

KABUPATEN TANAH DATAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016 – 2021 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***. Visi ini menggambarkan tentang wujud masa depan yang lebih baik yang didambakan oleh pimpinan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021. Karakteristik yang terkandung dalam visi ini menantang orientasi masa depan (*future oriented*) yang akan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Misi yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mewujudkan visi daerah tersebut adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat, dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas dan berakarakter berdasarkan falsafah ABS-SBK.
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Padang Ganting yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya
2. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Padang Ganting dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah :
 - a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah :
 - a. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah :
 - a. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
4. Sasaran dari tujuan keempat adalah :
 - a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padang Ganting

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama,	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Musholah yang dikunjungi dalam	4	4	4	4	4

	adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya		pembinaan keagamaan					
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	5 cbg	6 cbg	7 cbg	7 cbg	7 cbg
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemeratan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	22 kali 2 Nagari	22 kali 2 Nagari	22 kali 2 Nagari	22 kali 2 Nagari	22 kali 2 Nagari
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	11 sekolah	11 sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	2 Nagari	2 Nagari	2 Nagari	2 Nagari	2 Nagari
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	7 kali 2 Nagari	7 kali 2 Nagari	7 kali 2 Nagari	7 kali 2 Nagari	7 kali 2 Nagari
5	Meningkatkan	Meningkatnya	Persentase /	329	274	119	64 org	55 org

	penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	kualitas pelayanan public	jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	org	org	org		
			Terlaksana pendistribusian Raskin	611 RTS	611 RTS	611 RTS	611 RTS	611 RTS
			Jumlah Kelompok/organisasi masyarakat yang dibina	12 Kelom pok	12 Kelom pok	12 Kelom pok	12 Kelom pok	12 Kelom pok

Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
KECAMATAN PADANG GANTING

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kecamatan		Indek kepuasan masyarakat (IKM)						
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan dan Akuntable	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP Nilai peringkat						
			Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan tepat waktu						
			1. Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. RKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Laporan Keuangan semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. LKjIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. LKPJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8. Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana cara (strategi) mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang akan ditempuh selama lima tahun.

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjut adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan kebijakan operasional.

Kebijakan disini adalah pedoman/ rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Ganting terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan mencakup :

Tabel 5.1.i.

***Tujuan 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum***

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	KEBIJAKAN	PROGRAM
1.1.Terlaksananya koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.		✓ Peningkatan koordinasi
1.2.Terlaksananya pengawasan jalannya pemerintahan.		✓ Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pembangunan Umum.

1.3.Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.		✓ Peningkatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
--	--	--

Tabel 5.1.ii.

Tujuan 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	KEBIJAKAN	PROGRAM
2.1.Terlaksananya peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari.	Terlaksananya Adm Pemerintahan Nagari secara tertib dan terus menerus.	✓ Peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari
2.2.Terlaksananya pembinaan lembaga pemerintahan nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari	Pembentukan Tim pelaksana Pemerintahan Nagari dan lembaga Kemasyarakatan nagari.	✓ Peningkatan pembinaan lembaga pemerintahan nagari dan kemasyarakatan nagari
2.3.Terlaksananya pembinaan perangkat nagari.	Pembinaan dilakukan secara priodik dan berkelanjutan.	✓ Peningkatan pembinaan perangkat nagari.

Tabel 5.1.iii.

Tujuan 3 : Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang prima dan Efektif.

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	KEBIJAKAN	PROGRAM
Terlaksananya pelayanan umum yang baik kepada	Pelaksanaan pelayanan cepat,	✓ Perbaikan system dan prosedur

masyarakat .	murah dan menyenangkan	pelayanan ✓ Sosialisasi dan rajin kelapangan.
--------------	---------------------------	---

Tabel 5.1.iv.

Tujuan 4 : Meningkatkan Pembinaan Agama dan Sosial Budaya

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	KEBIJAKAN	PROGRAM
4.1.Terjadinya peningkatan pembinaan keagamaan	✓ Peningkatan pembinaan keagamaan, seni, olah raga, keluarga miskin, anak sekolah dan masyarakat.	✓ Peningkatan pembinaan keagamaan.
4.2.terksananya peningkatan pembinaan lembaga kesenian, olah raga dan budaya.		✓ Peningkatan pengawasan penyelenggara n pembangunan Umum.
4.3.Terlaksananya peninkatan pembinaan keluarga miskin	✓ Membentuk lembaga ekonomi keuangan masyarakat	✓ Peningkatan pembinaan keluarga miskin
4.4.Terlaksananya peningkatan pembinaan pendidikan	✓ Membentuk dewan pendidikan dan Pembina terpadu dan sector.	✓ Peningkatan pembinaan ke sekolah formal dan non formal
4.5.Terlaksananya peningkatan pembinaan kesehatan masya rakat.	✓ Membentuk institusi posyandu.	✓ Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

Tabel 5.1. v.

Tujuan 5 : Meningkatkan Tertib Administrasi

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	KEBIJAKAN	PROGRAM
5.1. Terlaksananya tertib Administrasi Pemerintahan	✓ Setiap bagian wajib melaksanakan tertib administrasi.	✓ Peningkatan pengelolaan administrasi
5.2 Terlaksananya tertib Administrasi keuangan		
5.3.Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian		
5.2 Terlaksananya tertib Administrasi Pembangunan		
5.1. Terlaksananya tertib Administrasi Kearsipan		

5.2 Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut :

Strategi pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud antara lain :

1. Meningkatkan kemampuan Aparatur dibidang pelayanan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan
3. Menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
4. Melakukan perencanaan dan monitoring evaluasi pelaporan
5. Penyediaan Laporan AKIP, LKJIP
6. Pelaksanaan Musrenbang nagari dan kecamatan
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan fisik dan non fisik.

Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri

2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah-rumah ibadah
4. Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya
5. Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat
6. Menyusun SOP pelayanan publik yang baik
7. Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayanan publik
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi
11. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat
12. Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
13. Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat
14. Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
15. Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh semua pihak

Strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Padang Ganting dalam lima tahun mendatang yaitu pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG DIDASARKAN KOMPETENSI DAN DISIPLIN APARATUR			
MISI I ; MENINGKATKAN PEMAHAMANAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA , ADAT DAN BUDAYA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Meningkatkan pendidikan , pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya	Sasaran 1.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agamal Sasaran 1.2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Strategi 1.1 Meningkatkan mutu pendidikan dan ajaran agama secara formal dan non formal Strategi 1.2 Mengembangkan pendidikan adat dan budaya melalui pendidikan formal dan non formal	Arah kebijakan 1.1.Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan di rumah- rumah ibadah 1.2 Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya 1.3 Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh agama dan adat

MSI II ; MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SEIRING PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT			
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Sasaran 2.1 Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Strategi 2.1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kecacamatan Padang Ganting Strategi 2.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayan masyarakat Strategi 2.3 Meningkatkan kuantitas infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesehatan warga	Arah Kebijakan 2.1 Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri 2.2 Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 2.3 Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
MISI III MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan	Sasaran 3.1 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Strategi 3.1 Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya	Arah kebijakan 3.1 Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam

pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran		pembangunan 3.2 Meningkatkan bantuan modal dan sarana penunjang produksi	pembangunan 3.2 Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi 3.3 Memgoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan aspirasi masyarakat 3.4 Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh semua pihak
Tujuan 4 Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Sasaran 4.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Strategi 4.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama	Arah kebijakan 4.1 Pembinaan politik kepada masyarakat 4.2 Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi
Tujuan 5 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi 5.1 Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah 5.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Arah kebijakan 5.1 Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 5.2 Menyusun SOP Pelayanan publik yang baik 5.3

			Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayanan publik
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis (Renstra) 2016 -2021 Kecamatan Padang Ganting merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Padang Ganting yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Ganting tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Padang Ganting.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016-2021 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan

6.1.Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Padang Ganting Selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Camat Padang Ganting akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Padang Ganting berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No.09 Tahun 2017, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Padang Ganting disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Padang Ganting adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrembang Nagari dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Padang Ganting, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ini semua dilalui dalam proses Musrembang, maka peningkatan partipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrembang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Padang Ganting bersumber pada dana APBD Kabupaten Tanah Datar . Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari instansi induknya.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Padang
Ganting Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												peanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)			
							Target	RP	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas kebersihan anak didik disekolah-sekolah	Meningkatnya pemahaman kebersihan dilingkungan sekolah	Persentase sekolah sehat	1.02.4.01.17.19	Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kebersihan dilingkungan sekolah	100 %	100	0	100	0	100	5.94 0.83 7,91	100	6.9 33. 323 ,58	100	8.4 80. 847 ,48	100	8.660.6 36,30	Kasi Kesos	Ktr Camat Padang Ganting
Meningkatnya partisipasi	Meningkatnya pemeliharaan	Prosentase nagari	2.13.4.	Program : Pembinaan	Persentase penyelenggaraan	100 %	100	0	100	0	100	116. 695. 030,	100	12. 869 .98	100	10. 261 .82	100	12.384. 709,91	Kasi Kesos	Ktr.Camat Padang

asi masyar akat dibidan g olah raga	man olah raga ditenga h- tengah masyar akat	yang dibina		aan dan Pemasy arakata n olahrag a	enggar aan kompet isi olahrag a							46		1,8 9		5,4 5				g Gantin g
Mening katkan kesejah teraan masyar akat melalui peningk atan pertum buhan ekonom i daerah dan pemerat aan pendap atan	Meni Mening katnya partisip asi pemuda dalam pemban gunan	Jumla h Kelom pok pemu da yang dibina	2.13.4.01.17.16	Progra m : Peningk atan peran serta kepemu daan	Persent ase organis asi pemud a di Kecam atan yang difasilit asi	100 %	100	0	100	0	100	55.1 64.9 23,4 9	100	58. 066 .58 4,9 8	100	58. 517 .84 7,6 3	10 0	61.490. 517,73	Kasi Kessos	Ktr.Ca mat Padan g Gantin g

sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran																				
Meningkatkan harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	Angka kriminalitas	1.06.4.01.17.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan	100 %	100	0	100	0	100	7.63 8.22 0,18	100	8.6 66. 654 ,47	100	9.3 28. 932 ,23	100	9.526.699,93	Kasi kessos	Ktr Camat Padang Ganting
Meingkatkan	Berkurangnya kenakal	Angka kriminalitas	11.06.4	Program Pemeliharaan	Tingkat Pemeliharaan	100 %	100	00	100	0	100	13.5 79.0 58,0	100	14. 733 .31	100	15. 265 .52	100	17.148.059,87	Kasi Tapem	Ktr Camat Padang

harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	an remaja dan perbuatan tercela			araan Kantran tibmas dan pencegahan tindak kriminal	haraan kantra ntibmas yang dilaksanakan							9		2,61		5,47				g Ganting
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Mesjid yang dikunjungi alam pembinaan keagamaan	1.06.4.01.10.17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase aktivitas keagamaan yang diikuti	100 %	100	0	100	0	100	35.645.027,49	100	38.999.945,14	100	39.859.983,17	100	44.775.489,67	Kasi Kessos	Ktr Camat Padang Ganting

	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	1.19.1.20.18.18.03	Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	100 %	7 cbg	0	8 cbg	0	10 cbg	0	12 cbg	0	10 cbg	0	100		Kasi Kesos	Ktr. Camat Padang Ganting
--	---	--	--------------------	---	---------------------------------	-------	-------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-----	--	------------	---------------------------

Mengopt imalkan kemamp uan keuanga n daerah dalam pembiay aan pemban gunn daerah	Mening katnya kemam puan keuang an daerah dalam pembiay aan pemban gunan daerah	Persen tase pening katan PAD	4.04.4.01.17.15	Progra m : Peningk atan dan pengem bangan pengelol aan keuang an Kegiata n : Intensifi kasi dan Ekstens ifikasi sumber - sumber pendap atan daerah	Cakup an Peluna san PBBC Cakup an Peluna san PBB	100	100	0	100	0	100	16.9 73.8 22,6 1	100	19. 499 .97 2,5 7	100	20. 354 .03 3,9 6	100	22.864. 079,83	Kasi Pelum	Ktr Camat Padang Ganting
--	---	--	-----------------	---	---	-----	-----	---	-----	---	-----	---------------------------	-----	-------------------------------	-----	-------------------------------	-----	-------------------	------------	--------------------------

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Kantor Camat Padang Ganting Yang Mengacu Pada
Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2016)	Tahun 1 (2017)	Tahun 2 (2018)	Tahun 3 (2019)	Tahun 4 (2020)	Tahun 5 (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Masjid / Mushalla yang dikunjungi dalam pembinaan keagamaan	70 %	70 %	75%	80%	85%	90%	100%
2	Jumlah Cabang Lomba MTQ yang diikuti Kecamatan	38	-	40		42		42
3	Jumlah Cabang lomba yang diikuti dalam kegiatan festival seni budaya	85 %	7 cbg	8 cbg	10 cbg	12 cbg	10 cbg	100 %
4	Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	80 %	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	11 sekolah	100 %
5	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	80 %	5 klp	7 klp	8 klp	9 klp	10 klp	95 %
6	Jumlah nagari binaan sadar hukum	75 %	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	90 %
7	Jumlah kelompok / organisasi masyarakat yang dibina	75 %	21 klp	52 klp	75 klp	104 klp	114 klp	100 %
8	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	75%	329 orang 100%	274 org 100%	119 org 100%	64 org 100%	55 org 100%	100%
9	Terlaksananya pendistribusian Raskin	100%	611 RTS 2 nagari	611 RTS 2 nagari	611 RTS 2 nagari	611 RTS 2 nagari	611 RTS 2 nagari	100%
10	Capaian Pelayanan Publik yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Indek Kepuasan Masyarakat	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali	5 kali	6 kali	7 kali

PENUTUP

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016-2021 memuat profil Kecamatan Padang Ganting serta Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Ganting untuk 5 tahun yang akan datang. Renstra ini disusun untuk menyesuaikan arah pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Padang Ganting dengan agenda pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kecamatan Padang Ganting berupaya mencurahkan segala daya upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dukungan semua pihak dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting tahun 2016-2021. Atas kekurangan yang terjadi, kami menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua pekerjaan dan pengabdian yang dilakukan mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Padang Ganting,
Camat Padang Ganting

Drs.AGUSRIL

NIP. 19680803 199009 1 001